

BAB V

KESIMPULAN

IMF merupakan sebuah lembaga yang fenomenal, sepak terjang dan berbagai langkah tentang penyembuhan yang mereka lakukan kepada negara anggota khususnya Negara dunia ketiga mengundang banya perhatian. Ada yang berhasil dengan baik dan ada juga yang mengalami kegagalan yang berarti. Dengan keberhasilannya itu, merupakan sebuah bukti yang tidak boleh dianggap enteng dengan keberadaan lembaga keuangan internasional ini di dunia, khususnya terhadap negara dunia ketiga. Namun di lain pihak dengan bukti yang jelas tentang salahnya rekomendasi yang mereka berikan kepada sebuah negara itu merupakan bukti benarkah IMF bekerja secara profesional tanpa standar ganda pemegang saham terbesar IMF (Amerika Serikat dan negara-negara Eropa).

Seiring waktu berjalan maka Indonesia yang sudah mengalami pahit getirnya pengalaman bersama IMF akhirnya berhenti juga dengan pemerintah menempuh opsi PPM (Post-Program Monitoring) yang telah diberikan oleh IMF. Memang dalam berbagai keadaan kita tidak bisa lepas begitu saja dari IMF, dimana utang yang masih harus ditanggung oleh Indonesia tidaklah sedikit dan itupun harus dilunasi, dan IMF memberikan konsekuensi waktu sampai tahun 2010. Sehingga bagaimanapun kita lepas dari IMF, masih ada saja keterpasungan kita terhadap kewajiban yang mesti kita bayar mahal. Maka tidak dapat dielakkan IMF "belum mau" melepaskan Indonesia dengan begitu saja. Letter of Intent merupakan produk IMF yang diberikan kepada Indonesia, berbagai segi negatif dan positifpun sudah kita dapatkan. Ditambah lagi dengan nilai PPM pemerintah kita yang merupakan penjaminan dengan neoliberal

Masa jabatan Megawati pun habis akhir tahun 2003. Dalam urusan politik dan ekonomi pasti Megawati mempunyai agenda tersendiri seiring dekatnya dengan pemilihan presiden yang akan diselenggarakan tahun 2004. Maka pada suatu saat Megawati pernah mengatakan seandainya terpilih kembali sebagai presiden beliau akan menuntaskan agenda reformasi dari jajaran kabinetnya yang belum selesai. Dengan demikian masa dimana beliau menentukan dengan tegas Indonesia sesudah dan setelah dengan IMF pun bermuatan politis untuk dapat mendorong kepemimpinannya menuju pemilihan presiden putaran 2004. Dapat dilihat dari RAPBN 2004 yang diajukan pemerintah, *white paper*, dan juga IMF mempunyai keterkaitan yang dalam hingga masa berakhirnya utang yang harus ditanggung oleh Indonesia sampai 2010.

Liberalisasi sektor keuangan, perdagangan, dan juga pemprivatisasian BUMN merupakan resep yang telah di berikan kepada pemerintahan Megawati. Maka tidak elak meskipun perekonomian kita sedikit terangkat dengan pertumbuhan yang baik, namun dilain pihak dibelakang kita IMF selalu saja menghantui keberadaan perekonomian Indonesia yang kian terpuruk. IMF pun menyadari bahwa resep yang diberikan kepada Indonesia ternyata salah demikian pula dengan pemerintahan yaitu Megawati. Itupun baru disadari Megawati ketika menjelang jabatannya berakhir dan juga mendekati pemilihan presiden 2004.

Dengan keberadaan seperti itu maka pemerintah baru yang akan terbentuk dengan pemilihan umum 2004 pasti akan tetap merasakan agenda yang telah direkomendasikan IMF terhadap pemerintah. Keberadaan ini dapat dilihat dalam kebijakan yang banyak yang tidak populer yang dilakukan pemerintah, diantaranya dengan menaikkan harga BBM, TDL dan juga tarif telepon. Masyarakat tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia dan tidak mau tahu

kebijakan yang diambil pemerintah sesungguhnya merupakan produk

Created with

 nitroPDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

dirkomendasikan IMF kepada kita. Entah sampai kapan kita bisa benar-benar lepas dari IMF, hanya waktu juga yang akan menjawabnya, dan mungkin kita memang sedang dijadikan kelinci percobaan oleh negara-negara kapitalis (Amerika Serikat).

Dalam beberapa kenyataan bahwa resep yang di berikan IMF ke Indonesia memang benar-benar membawa kita menuju kebangkrutan. Liberalisasi perdagangan, dalam hal ini penjualan sektor BUMN secara besar-besaran menunjukkan semakin dominannya faktor IMF dalam menentukan kebijakan. Dan justru dalam kenyataannya bahwa pemprivatisasian BUMN kita tidak banyak mendatangkan biaya penanggulangan utang yang masih ditanggung Indonesia, entah dengan berbagai alasan mereka melakukan ini.

Di sisi lain dalam hal liberalisasi sektor keuangan dimana IMF sangat menekan pemerintah untuk dapat menjaga laju inflasi dan tingkat suku bunga yang harus dijaga pemerintah. Dan juga dalam hal penyusunan APBN baik secara langsung maupun tidak banyak biaya yang tidak masuk akal yang dimasukan pemerintah. Banyak pos-pos anggaran yang terus menerus di gencet oleh pemerintah yang justru menyengsarakan rakyat, diantaranya pajak yang semakin tinggi dan juga penghapusan subsidi bagi kaum miskin.

Pada kenyataannya keterlibatan IMF di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal berikut. *Pertama*, adanya aliran dana pinjaman IMF yang masuk ke Indonesia untuk menutupi defisit APBN (kesenjangan pembiayaan). *Kedua*, perbaikan kondisi ekonomi makro yang berdampak pada peningkatan kepercayaan pasar atau investor. *Ketiga*, dukungan IMF bagi Indonesia dalam memperoleh persetujuan penjadwalan utang dalam Paris Club. Selama ini tidak ada negara yang pernah ...

Inti masalah yang menyangkut hubungan dengan IMF adalah terletak pada keberadaan sebuah surat kesepakatan yang telah dihasilkan oleh kedua belah pihak, antara pemerintah dengan IMF. Surat tersebut yang lebih dikenal dengan Letter of Intent mengandung banyak persoalan yang sesungguhnya telah jauh masuk kedalam berbagai bidang yang justru sangat memberatkan pemerintah, yang sebenarnya ada hak yang harus diemban pemerintah sebagai amanat yang benar dari kebijakan IMF dalam hal penyembuhan perekonomian sebelum krisis dan pasca krisis.

Sektor yang paling banyak dicampuri oleh IMF adalah pada kebijakan yang menyangkut perbankan dan penentuan kebijakan yang berorientasi pada kebijakan publik. Bank yang menunjukkan keterpurukannya, sedangkan pada kebijakan publik seperti kenaikan BBM dan tarif dasar listrik (TDL), dan telepon justru sangat memberatkan rakyat dan memperburuk citra pemerintah dimata rakyat. Maka kuncinya terletak pada penerapan dan pemberlakuan kebijakan Letter of Intent itu sebagaimana